

RIBUAN WISATAWAN OBWIS PANSEL PUTAR BALIK

Masuk Melalui Jalan Jalur Tikus

WONOSARI (KR) -Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 4 diperpanjang dan objek wisata Pantai Selatan (Pansel) di Gunungkidul masih ditutup tetapi banyak wisatawan yang nekat berusaha masuk ke kawasan wisata melalui jalan tikus.

Kiat wisatawan mengelabui petugas penjaga pintu gerbang obwis akhirnya diketahui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang akhirnya ribuan wisatawan tersebut diminta putar balik ke daerah asalnya. "Data kumulatif wisatawan yang diminta putar balik dalam seminggu mencapai ribuan dengan tujuan berwisata di Pantai Selatan," kata Paneuw Anom Kapanewon Giri-subo, Gunungkidul Arif

Yahya, Rabu (25/8). Untuk Kapanewon Giri-subo Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah menghalau wisatawan yang akan berkunjung memang cukup banyak, tetapi Satgas Covid-19 tetap memperketat penjagaan di jalan-jalan sampai tingkat perkampungan jalan menuju kawasan pantai selatan, saat ini para wisatawan yang hendak berkunjung memang semakin banyak dan mencapai ribuan orang

per hari. Koordinator SAR Satlinmas Wilayah 1 Gunungkidul, Sunu Handoko Bayu Segara SIP menambahkan, pihaknya akan tetap menghalau wisatawan yang nekat berkunjung ke pantai selatan karena statusnya memang belum dibuka. Timnya selalu melakukan penjagaan di empat Tempat Penarikan Restribusi (TPR), yaitu di TPR Sadeng, TPR Wediombo, TPR Watulumbung, dan TPR Siung.



Wisatawan dari Jawa Tengah diminta putar balik.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Harry Sukmono, menambahkan jika objek-objek wisata di Gunungkidul masih ditutup untuk sementara. Pihaknya meminta bagi wisatawan agar menahan diri terlebih

dahulu hingga objek wisata diperbolehkan dibuka kembali. Sesuai aturan PPKM obwis di Kabupaten Gunungkidul belum dibuka karena itu meminta wisatawan bersabar. (Bmp)-f

DISPAR DIY DUKUNG KESIAPAN OBWIS

Vaksinasi Sektor Wisata Dikebut



KR-Dedy EW

Vaksinasi di objek wisata Ngingrong, Wonosari

WONOSARI (KR) - Kepala Dinas Pariwisata DIY Ir Singgih Raharja MED mengungkapkan, pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat dirasakan sektor pariwisata. Karena sampai sekarang belum boleh dibuka. Guna membantu kesiapan akti-

vasi objek wisata (obwis), Dinas Pariwisata DIY menyerahkan bantuan sarana untuk mendukung sektor wisata. "Bantuan yang diberikan di antaranya berupa handsanitizer, sabun cair dan perlengkapan lain yang akan dipergunakan ketika nanti obwis sudah

diperbolehkan dibuka," kata Singgih Raharja di sela-sela pemberian bantuan sektor wisata di Obwis Ngingrong, Mulo, Wonosari, Rabu (25/8).

Bersamaan juga dilaksanakan vaksinasi dosis kedua di obwis Ngingrong. Diungkapkan, bantuan sarana persiapan tersebut juga diberikan di wilayah Mangunan, Goa Selarong dan akhir pekan di wilayah Kulonprogo. Vaksinasi sektor pariwisata terus didorong untuk percepatan. Selain dalam rangka kesiapan obwis kembali dibuka, juga mendukung tercapainya kekebalan kelompok 70 persen. "Terlebih sektor pariwisata berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kesiapan pengelola obwis maupun wisata-

wan juga perlu untuk dimaksimalkan," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Asty Wijayanti menambahkan, jika nantinya obwis sudah boleh dibuka, tentunya ada standar pelayanan baru. Baik pelaku wisata sudah menjalani vaksinasi, protokol kesehatan hingga wisatawan yang datang. Dikoordinasikan layanan sentra vaksin bagi sektor wisata.

Dinas akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, agar nantinya dapat menyediakan sentra layanan vaksinasi. "Jika nanti aturan obwis sudah boleh dibuka, akan disosialisasikan standar kesiapan layanan bagi objek wisata di Gunungkidul," jelasnya.

(Ded)-f

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PIAGAM KEDUDUKAN Proses Menuju Proklamasi

PROSES menuju Proklamasi Kemerdekaan RI mempunyai banyak dimensi yang semuanya berperan penting. Tapi setidaknya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah konteks internasional, kedua konteks nasional dan ketiga konteks daerah.

Menurut sejarawan USD Dr Baskoro Tulus

Wardaya SJ, konteks internasional itu perlu kita lihat, karena sebelum Proklamasi terjadi Perang Dunia II. Pada saat Perang Dunia II, Indonesia waktu itu berada di bawah pendudukan militer Jepang, dan Jepang itulah yang nantinya akan dilawan oleh Sekutu. Karena Jepang kalah dan Sekutu menang, kemudian Jepang menyerah. Terutama setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki.

"Kesempatan itulah yang membuka pintu bagi diproklamkan kemerdekaan Indonesia," kata Dr Baskoro ketika rekaman video dokumenter mengenai sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI dan Piagam Kedudukan. Video dokumenter itu akan ditayangkan di YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>.

Sedangkan dilihat dari konteks nasional, lanjutnya, kesempatan itu adalah bagian dari kehebatan para pejuang kemerdekaan kita untuk memanfaatkan konteks internasional bagi sebuah negara republik yang akan dilahirkan. Ini memang tidak mudah. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta minta untuk menunggu agar jangan proklamasi dulu, karena meski secara de jure Jepang sudah



KR-Fira Nurfitriani

Dr Baskoro Tulus Wardaya SJ

menyerah, tapi secara de facto tentara Jepang berikut senjatanya masih ada. "Kalau sampai marah, rakyat juga yang kena. Maka para pejuang diminta menunggu agar tidak proklamasi dulu," katanya.

Tapi, di sisi lain, para generasi muda waktu itu tidak sabar menunggu. Maka terjadilah peristiwa Rengasdengklok pada

16 Agustus, dan akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada Jumat, 17 Agustus 1945.

Tapi jika yang dilihat hanya konteks internasional belum cukup, karena rakyat hidup di daerah. "Kemerdekaan baru menjadi kenyataan kalau didukung rakyat," katanya. Secara de facto, rakyat di masing-masing daerah juga punya pemimpin. Seperti di Yogya, rakyat punya pemimpin Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Pemimpin di masing-masing daerah itu penting perannya untuk menggerakkan rakyatnya guna mendukung Proklamasi Kemerdekaan.

"Dukungan rakyat dan pemimpin di suatu daerah ini penting untuk menginspirasi dukungan terhadap Proklamasi Kemerdekaan dari daerah lain," katanya.

Terkait dukungan Yogyakarta, dalam hal ini Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pura Pakualaman terhadap Proklamasi Kemerdekaan sangatlah luar biasa. Karena dukungan Yogyakarta itu meliputi beberapa level. Ada level simbolik, ada level politis, juga level ekonomi. Belum lagi lapisan strategi. "Jadi ada lapisan unsur yang menurut saya penting untuk Yogyakarta," katanya pula. (Ira)-f

Era New Reality Tingkatkan Kualitas Diri

SENTOLO (KR) - New reality merupakan sebuah realitas baru, kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas diri.

Dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kualitas diri dalam menghadapi tantangan globalisasi, Anaas Tri Ridlo Dina Yuliana SPd MPd, selaku dosen Pendidikan Agama Islam UAD memandang perlu adanya edukasi terkait hal tersebut.

Edukasi ini dilaksanakan di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo. Edukasi berlangsung di 3 Padukuhan, yakni Padu-

kuan Blimbing, Gembongan dan Worawari. Untuk di Padukuhan Blimbing dan Gembongan dilaksanakan secara daring via Google Meet, Sabtu 21 Agustus.

Sedangkan di Padukuhan Worawari dilaksanakan secara luring, Minggu 22 Agustus 2021 di rumah Dukuh Agus Sudaryanto. "Edukasi dilaksanakan dengan sasaran anak SD dan SMP," ujar Anaas, Rabu (25/8).

Anaas memaparkan, dalam meningkatkan kualitas diri di era new reality dengan memulai manajemen diri sejak dini yakni dengan manajemen



KR-Istimewa

Saat edukasi tingkatkan kualitas diri diikuti anak dan orangtua.

waktu, tingkah laku, penampilan diri, dan interaksi dengan orang lain.

"Manajemen waktu, hen-

daknya generasi muda jangan terlenu dengan nikmat sehat dan waktu luang," tandasnya. (Wid)-f

KPP Pratama Gelar Pajak Bertutur

WATES (KR) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur yang diikuti 400 peserta dari 20 SMA dan SMP di Kulonprogo dalam bentuk kelas pajak secara daring, Rabu (25/8). Kegiatan ini juga serentak seluruh Indonesia oleh 626 unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lebih 600 sekolah dan PT dengan lebih 18.000 peserta.

Kepala KPP Pratama Wates Nashrul Asyir menuturkan, kegiatan Pajak bertutur tahun ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 RI yang bertepatan "Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara" dengan tagline 'Sehari Mengenal, Selamanya Bangsa'.

"Pajak bertutur adalah bagian dari program inklusi kesadaran pajak dalam dunia pendidikan yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak bersama Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan ke-

sadaran perpajakan kepada peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi perpajakan dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan," ujar Nashrul Asyir.

Menurutnya, dalam acara ini Kantor Pelayanan Pajak bercerita kepada generasi muda tentang apa manfaat dan mengapa kita membayar pajak, dengan harapan tidak ada lagi pertanyaan mengapa harus membayar pajak, sebagai wujud warganegara yang berwawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara.

Narasumber atau pengajar dalam kegiatan ini yang terdiri para Fungsional Penyuluh dari KPP Pratama Wates yang mengenalkan kesadaran pajak sebagai wujud bela negara, dan acara diselingi dengan kuis berhadiah. Selain kelas pajak, KPP Pratama Wates juga mengadakan Lomba Vidio Pendek dengan tema yang sama diikuti seluruh pelajar SMA/SMP di Kulonprogo dengan hadiah jutaan rupiah. (Wid)-f

'SIABAH' INOVASI RUPBASAN WATES Mengantar Benda Sitaan Negara ke Pemilik

WATES (KR) - Layanan Siap Antar Barang sampai ke Rumah 'Siabah' dan Service Merdeka merupakan inovasi terkini yang diluncurkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Wates dalam rangkaian peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia.

"Layanan 'Siabah' merupakan layanan pengantaran benda sitaan yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Barang diantar sampai ke rumah sesuai permintaan pemiliknya. Barang sitaan yang diantar berupa sepeda motor dan juga mobil," kata Kepala Rupbasan Kelas II Wates, Moch Kund Bedraningrat, Rabu (25/8).

Program itu ungunya untuk mendukung kegiatan zero overstay benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran). "Sekaligus mendukung terwujudnya hukum yang berkeadilan," tegas Kund Bedraningrat. Tentang layanan Service Merdeka merupakan layanan perbaikan kendaraan basan dan baran. Dalam pelaksanaannya Rupbasan Kelas II Wates bekerjasama dengan SMK Muhammadiyah 1 Godean merawat sepeda motor. (Rul)-f



KR-Istimewa

Petugas Rupbasan menyaksikan perawatan sepeda motor.

MWCNU Semin Santuni Yatim Piatu

WONOSARI (KR) - Unit Pengelola Zakat Infak Sidaqoh Nahdlatul Ulama (UPZISNU) Kapanewon Semin, Gunungkidul melaksanakan pentasaruhan santunan menyasar anak yatim piatu dan dhuafa. Kegiatan dikemas dengan pemberian 112 paket bingkisan dan uang santunan. "Pelaksanaan santunan dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Terlebih pada bulan Muharram ini menjadi momentum yang istimewa untuk melaksanakan pemberian bingkisan dan santunan bagi yatim piatu maupun para dhuafa. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah," kata Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kapanewon Semin Fathul Muadib SPdI, Selasa (24/8).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil gerakan koin dari masyarakat dan para donatur. Bantuan diserahkan di Kantor MWCNU Semin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diungkapkan, bersedekah terlebih di bulan Muharram akan menjadi ladang amal dan memberikan manfaat yang besar. Panitia memberikan apresiasi kepada masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pentasaruhan santunan bagi para yatim piatu dan dhuafa. Harapannya tentu di masa-masa mendatang akan semakin banyak dermawan yang berbagi zakat infak sudaqoh melalui NU Care-LAZISNU Kapanewon Semin. (Ded)-f

REFLEKSI MENUJU UUK 'Sense of Crisis' di Masa Pandemi

PADA 31 Agustus 2021 ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) genap berumur sembilan tahun.

Dr Haryadi Baskoro, kolumnis Keistimewaan Yogya dan pengelola network eRuang Tamu Jogja Istimewai memberikan beberapa catatan untuk implementasi Keistimewaan DIY dalam diskusi rangkaian refleksi Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Diskusi tersebut merupakan hasil kerja sama Paniradya Kaistimewan DIY dengan Sekber Keistimewaan DIY. Rekaman video diskusi akan ditayangkan di YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>.

Menurutnya, UUK sudah menegaskan tujuan Keistimewaan DIY secara gamblang sehingga tinggal diterjemahkan dalam perencanaan. Pada pasal 5 UUK, tujuan Keistimewaan itu adalah untuk mewujudkan pemerintahan demokratis, kesejahteraan rakyat, kebhinneka tunggal ikaan, pemerintahan yang baik, serta Kasultanan dan Pakualaman yang berperan aktif membangun budaya Yogya.

"Yang diperlukan dalam implementasi adalah transparansi dan akuntabilitas. Lalu harus kuat dalam evaluasi berbasis riset akademik, seperti dulu dilakukan oleh Asisten Keistimewaan (sekarang Paniradya Kaistimewan). Bahkan kita perlu membuat semacam Indeks Pembangunan Keistimewaan," katanya.

Menurut Dr Haryadi Baskoro, implementasi harus fleksibel, taktis, inovatif, dan kreatif. Prinsipnya adalah



KR-Riyana Ekawati

Dr Haryadi Baskoro

'tancapkan visi pada beton namun tancapkan strategi pada pasir'. Jangan sampai Keistimewaan DIY malah membuat kita kaku dan terkungkung sehingga tidak bisa berpikir dan bertindak 'out of the box'. Di masa pandemi misalnya, kita jangan kaku dalam implementasi Dana Keistimewaan (Danais), harus ada 'sense of crisis' dan fleksibel.

"Kuncinya adalah revolusi mental. Sultan HB X dalam pidato visi-misi Abad Samudera untuk RPJMD DIY periode 2017-2022 pada Agustus 2017 silam, sebenarnya sudah menekankan supaya ASN dan pejabat jangan bermalas-malasan atau sekadar kerja proyekan, tetapi berkarya besar untuk membangun peradaban," tegasnya. (Ria)